

## **Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme**

**Agus Subagyo <sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi  
agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

### **Abstract**

*This paper wants to explain and analyze about Pancasila as the ideology of the Indonesian state as a solution / medicine to solve the problem of intolerance, radicalism, and terrorism, which lately is rife in society. Pancasila can be used as an antidote in eradicating intolerance, radical behavior and acts of terror, which endanger national security and the integrity of the Indonesian state. The values contained in Pancasila, whether God, Humanity, Unity, Consensus, and Justice, must be earthed, practiced, and applied in the life of the nation, state and society. Pancasila must become a code of conduct, value system and system of movement for the Indonesian people.*

**Keywords:** *Pancasila, Intolerance, Radicalism, Terrorism.*

### **I. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini, bermunculan berbagai ideologi sehingga menantang dan bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selama ini, ideologi yang sering diwaspadai selama Orde Lama dan Orde Baru adalah ideologi liberalisme kapitalisme dan ideologi sosialisme komunisme. Kedua ideologi ini terus dijadikan sebagai musuh bersama karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Bahkan, ideologi sosialisme komunisme sampai dilarang berkembang di wilayah Indonesia pada masa Orde Baru. Selain itu, terdapat pula ideologi yang mendasarkan pada agama, yang kemudian ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yakni ideologi agama tertentu serta menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama, yang tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan hakekat awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara yang didasarkan bukan atas persamaan agama, melainkan persamaan nasib sepenanggungan dijajah oleh kolonialisme Belanda.

Di era reformasi sekarang ini, telah menguat kembali ideologi yang mengatasnamakan agama, yang terefleksikan dalam ideologi, faham, maupun mazhab radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme, yang berpotensi melahirkan terorisme, dan bahkan separatisme. Maraknya aksi menolak keberagaman, menentang kebhinekaan, dan menolak dasar negara Pancasila merupakan benih-benih yang dapat mendorong sikap, perilaku dan tindakan terorisme yang ada di tengah masyarakat. Perilaku radikalisme tercermin dalam penolakan terhadap agama lain, membakar rumah ibadah agama lain, menghalalkan "darah" umat agama lain, dan mengkafirkan umat agama lain. perilaku fundamentalisme terefleksi dari agamanya yang paling benar, agama lain dianggap salah, dan mengajarkan / menerapkan ajaran agamanya secara keras / mendasar. Sektarianisme terwujud dalam maraknya ajaran sesat, ajaran yang mengujarkan kebencian, perilaku eksklusif / tertutup, dan tidak mau berinteraksi dengan ajaran agama lainnya.



Sikap, perilaku dan tindakan yang berbasis pada fundamentalisme, sektarianisme, dan radikalisme mengkristal menjadi aksi terorisme. Hal ini tercermin dari serangkaian aksi terorisme di Indonesia yang marak sejak era reformasi sampai dengan saat ini. Munculnya kelompok Jemaah Islamiyah (JI), kemudian menjadi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), berubah lagi menjadi Majelis Indonesia Timur (MIT) dan Majelis Indonesia Barat (MIB), yang akhirnya sampai saat ini telah bermetamorfosa menjadi Jamaah Anshorut Daulah (JAD), telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami "darurat ideologi". Aksi terorisme di Indonesia semakin menguat dengan adanya ISIS di Irak dan Suriah, dimana banyak sel-sel teroris di Indonesia berbaiat ke ISIS dan melakukan aksi teror atas perintah dan arahan ISIS. ISIS dibawah pimpinan Abu Bakar Al Baqddadi sebagai organisasi teroris internasional seolah-olah menjadi ancaman baru di dunia dan di Indonesia, menggantikan Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden.

Maraknya praktek radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian kecil ormas keagamaan, namun juga telah menjadi "virus" yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. Intoleransi telah terlanjur menyebar bak penyakit di kalangan dunia pendidikan, baik sekolah

dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Sebagai contoh kecil, bukankah di sebagian lingkungan SMA, sadar atau tidak sadar, untuk memilih Ketua OSIS cenderung dari agama mayoritas siswa SMA tersebut?. Ditambah lagi dengan memilih pemimpin diarahkan yang seagama, pendirian rumah ibadah yang sulit, dan menghalangi orang untuk beribadah. Itu semua contoh intoleransi, yang sangat membahayakan, karena akan mendorong perilaku radikalisme, yang menyebabkan aksi terorisme.

Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, sering disebut dengan "empat pilar kebangsaan", Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia sebagai perekat bangsa, fondasi negara, dan ideologi negara. Keistimewaan Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila, yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, dimana hanya Indonesia pemilik Pancasila, dan itulah keistimewaan dan keunikan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. setiap upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain selain Pancasila adalah perbuatan yang mengingkari terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa, dan untuk itu harus disingkirkan dari bumi Indonesia.

Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila telah mengalami berbagai ancaman dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, namun sampai saat ini Pancasila masih



berdiri kokoh sebagai dasar negara dan ideologi negara. dalam perspektif historis, upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain telah ada sejak zaman dulu, dimana terdapat upaya menanggalkan Pancasila dengan ideologi sosialisme komunisme (PKI) dan ideologi agama (DI/TII). Saat ini, Pancasila juga tengah menghadapi ancaman serius dimana terdapat beberapa Ormas Anti Pancasila sedang menginginkan Pancasila diganti dengan ideologi lain, NKRI ingin dirubah menjadi negara khilafah, Pancasila dianggap sebagai kafir, serta penganut Pancasila sebagai thogut.

Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi masalah terkait dengan eksistensi nilai-nilai Pancasila di era reformasi, khususnya dengan maraknya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat, yakni : (1) Nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan bela negara yang ada di tengah masyarakat mengalami pelemahan dan degradasi baik pada kalangan pemuda, mahasiswa, Ormas, LSM, maupun elemen PNS / ASN, dan komponen bangsa lainnya; (2) Pancasila dianggap "kuno", "jadul", dan "ndeso", serta dianggap kurang "kekinian", ditambah lagi Pancasila hanya menjadi slogan dan lips services oleh para pemain dan aktor politik, namun tidak dihayati, dijiwai dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) NKRI diganti dengan bentuk negara lain; (4) Bhineka tunggal ika yang didalamnya menjamin keberagaman, kemajemukan dan pluralitas telah mengalami ancaman dimana mayoritas sewenang-wenang dan minoritas terasingkan, sehingga

terjadi diskriminasi, isolasi, marginalisasi, dan represi, yang mengarah pada disharmoni sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal, penangkis dan penindak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ibarat orang sakit, maka Pancasila menjadi "obat mujarab" untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sebagai bangsa yang sakit, Pancasila akan menjadi "obat" yang ampuh dan manjur dalam mengobati bangsa Indonesia yang sedang terjangkiti "virus-virus" intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Penyakit intoleransi, radikalisme, dan terorisme akan dimusnahkan oleh obat bernama Pancasila dan juga Pancasila menjadi sistem "imun" yang mampu menangkal "virus" intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang masuk ke dalam badan / tubuh bangsa Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa apa adanya, tanpa adanya fakta dan data yang ditutupi, menguak sebab akibat, dan mengungkap makna dibalik sebuah peristiwa, kejadian, dan gejala tertentu (Sudarwin Danim, 2013 : 17). Jenis penelitian kualitatif menganalisis peristiwa secara hakiki, mengutamakan makna di balik data dan angka, serta mengungkap penyebab suatu peristiwa secara terang benderang, jelas, teliti, dan menggunakan kata, kalimat, dan narasi



yang komprehensif, sistematis dan penuh makna (Sugiono, 2010 : 49).

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, studi literatur, maupun studi pustaka, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, menganalisis, dan memaknai berbagai buku, laporan penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, maupun internet daring, yang terkait dengan fokus penelitian ini. Dokumen berupa pustaka ini dipilah, disajikan, dan dinarasikan secara berurutan untuk membuktikan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, antara data yang satu dengan data yang lain, serta mengkaitkan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, sehingga dapat memperkuat dan membuktikan argumentasi maupun menjawab proposisi teoritik dalam penelitian ini.

### **III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Temuan Penelitian**

Kaelan (2004: 23) menyatakan bahwa Pancasila berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari Panca dan Sila. Panca artinya lima, sila artinya elemen, unsur, sendi. Dengan demikian, Pancasila dapat dikatakan sebagai lima elemen, lima unsur, atau lima sendi, yang harus menjadi patokan, pedoman dan pegangan bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam menyelenggarakan segala aspek kehidupan. Pancasila dirancang oleh para founding father, khususnya Soekarno, yang menjadi ideologi negara, dasar negara, dan falsafah negara.

Agus Subagyo (2015: 4), menegaskan bahwa Pancasila merupakan

identitas, jati diri, tanda pengenal, dan trade mark bangsa Indonesia, sehingga harus dipahami, diamalkan, dijiwai, dan dihayati dalam hati sanubari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila yang diperingati hari lahirnya pada tanggal 1 Juni dan diperingati kesaktiannya pada tanggal 1 Oktober harus mampu menjadi senyawa untuk mewujudkan ketahanan ideologi sebagai bagian dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi filter / penyaring dan juga sistem imun / kekebalan yang mampu menangkal, mencegah, menindak dan menangkis segala bentuk ideologi lain yang muncul di era globalisasi saat ini.

Yudi Latif (2011: 45), menjelaskan secara detail bahwa Pancasila merupakan kehendak rasional bangsa dan sebagai jawaban terhadap pluralitas, kemajemukan dan multikulturalisme bangsa Indonesia. Artinya, sebagai sebuah ideologi, Pancasila bersifat logis, rasional, universal, dan sistematis. Pancasila merupakan nilai yang berasal dari leluhur, melalui proses perjuangan panjang, dan mencerminkan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus nasional yang bersifat final, mutlak, dan absolut.

Pancasila tidak boleh dipertentangkan dengan agama, khususnya Islam. Pancasila disusun oleh sebagian besar pejuang muslim dan tidak bertentangan dengan Piagam Madinah. Pancasila sangat dijiwai dan diwarnai oleh nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Keislaman dan Keindonesian telah mengkristal dalam ruh Pancasila sehingga sebagai bangsa, kita semua harus bangga karena memiliki



Pancasila. Hal ini dapat digambarkan dalam sebuah slogan yang diperkenalkan oleh Nurcholis Majid (1998 : 24), Cendekiawan Muslim, yang bunyinya sederhana, namun maknanya sangat mendalam, yakni : lebih bijak berkata "Saya Orang Indonesia Yang Beragama Islam" dan bukan berkata " Saya Orang Islam Yang Berada di Indonesia".

## **b. Pembahasan**

### **Kondisi Intoleransi Di Indonesia**

Berdasarkan data yang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga survei, pusat kajian, dan universitas, terdapat semakin maraknya kasus-kasus intoleransi di tengah masyarakat Indonesia. Intoleransi adalah suatu sikap, pandangan, dan perilaku yang tidak menerima perbedaan orang lain, kelompok lain, atau komunitas lain, sehingga memandang sesuatu yang berbeda darinya dianggap salah, haram, dan harus dimusuhi, diperangi, dan dimusnahkan (Projo Prastowo, 2006 : 31). Kasus-kasus intoleransi di Indonesia yang sering terjadi misalnya adalah penolakan aktifitas keagamaan umat tertentu, sulitnya perijinan rumah ibadah, terlalu cepat mengkafirkan orang yang tidak seagama dengannya, dan "menghalalkan" darah orang yang tidak seiman dengannya. Ditambah lagi dengan adanya Perda-Perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang cenderung mendiskreditkan umat tertentu, termasuk membawa politik identitas ke dalam ranah politik, untuk mendulang keuntungan pribadi maupun elit politik tertentu dalam kontestasi politik.

Survei yang dilakukan Setara Institute Tahun 2018 menempatkan DKI Jakarta di peringkat tiga kota paling intoleran. DKI Jakarta memiliki skor buruk di antara 94 kota lainnya di Indonesia yang disurvei. Ada empat variabel yang diukur yakni Regulasi Pemerintah Kota, Tindakan Pemerintah, Regulasi Sosial, dan Demografi Agama. Termasuk dalam variabel pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan yang diskriminatif.

Survei oleh LIPI menganalisa bahwa intoleransi politik di Indonesia semakin menguat pada tahun 2019. Hal itu berdasarkan survei yang dibuat LIPI pada 4 Desember 2019 terhadap 1800 responden di seluruh Indonesia. Sebanyak 57,88 persen responden mengatakan bahwa : "Kami hanya akan memilih pemimpin seagama. Hal ini mulai dari level RT sampai level Presiden dan Wakil Presiden. Jadi disimulasikan karena kerja atau bukan, tapi karena agama. Agama memberikan faktor dan alasan utama kenapa, seseorang memilih pemimpinnya. Implikasi dari hal tersebut menjadi sangat luas, dimana alasan orang hanya memilih pemimpin berdasarkan agama bakal berimbas pada mencegah seseorang supaya tidak memilih pilihan yang berbeda agama.

Hasil survei yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2019 menunjukkan tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sikap intoleransi di Indonesia, cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%. Ada juga kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yakni bisa melakukan



gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%. Selain itu, ada sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia yang pernah melakukan tindakan radikal.

Survei LSI mengungkapkan bahwa setidaknya 59,1 persen responden muslim keberatan jika dipimpin oleh pihak / kelompok / orang yang berbeda keyakinan. Sedangkan 31,3 persen merasa tidak masalah jika dipimpin nonmuslim. Sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Mayoritas warga muslim intoleran terhadap orang yang berbeda keyakinan menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota (Bupati / Walikota), Propinsi (Gubernur), Pusat (Presiden dan Wakil Presiden). Namun, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah nonmuslim masih tinggi. Sebanyak 53 persen muslim keberatan mereka yang berbeda keyakinan membangun rumah ibadah. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Sikap intoleransi religius-kultural cenderung turun sejak 2010, namun penurunan ini berhenti di Tahun 2017. Pasca Tahun 2017 intoleransi religius-kultural cenderung meningkat terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah.

### **Relasi Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme**

Maraknya sikap dan perilaku intoleransi di Indonesia sebenarnya sangat mengkhawatirkan terhadap keragaman Indonesia yang terbingkai dalam slogan "Bhineka Tunggal Ika" dan dalam kerangka rumah besar bernama NKRI, yang telah terbangun menjadi bangunan negara bangsa sejak

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Intoleransi merupakan tangga awal dari terorisme, dimana intoleransi merupakan benih munculnya radikalisme, yang kemudian akan menyebabkan aksi terorisme. Terorisme yang ada di tengah masyarakat berawal dari sikap dan perilaku intoleransi yang kemudian termanifestasikan dalam aksi teror. Aksi terorisme sangat membahayakan kemanusiaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaban, pluralisme, multikulturalisme, dan inklusifisme. Untuk memerangi terorisme, maka diperlukan upaya mendeteksi akar terorisme yang bermuara pada sikap intoleransi dan radikalisme.

Para pelaku teror yang selama ini melakukan aksi terorisme memiliki ideologi radikal yang cenderung tidak toleran terhadap keberbedaan, menentang heterogonitas, dan anti kebhinekaan. Sikap yang tidak mau berbeda, menganggap dirinya yang paling benar, memahami bahwa hanya agamanya yang paling benar, dan bahkan menganggap bahwa dirinya memiliki otoritas kebenaran, sehingga meniadakan orang lain, menganggap keyakinan orang lain salah, serta memaksakan kehendak agar supaya orang lain sama keyakinannya dengan dirinya, merupakan cerminan sikap intoleran, yang akan mengarah pada perilaku radikal. Radikalisme diwujudkan dengan melakukan pengrusakan, penistaan, pengkafiran, dan pembakaran terhadap fasilitas, benda, orang maupun sarana prasarana yang dianggap berbeda dan bertentangan dengan keyakinannya.



Sikap intoleran, perilaku radikal, dan aksi terorisme merupakan mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Agar supaya mampu memberantas aksi terorisme, maka diperlukan upaya untuk meredam perilaku radikal. Perilaku radikal hanya bisa dicegah dengan cara menghapus sikap intoleran di tengah masyarakat. Sikap-sikap toleransi, kebersamaan, harmoni, kebhinekaan, yang terbungkus dalam ideologi Pancasila harus dikedepankan di semua lapisan masyarakat agar supaya mampu mengikis dan menghilangkan sikap intoleran. Penanaman rasa toleransi keberagaman harus terpatri pada masyarakat Indonesia sejak dini, khususnya sejak jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Bahkan pendidikan dalam keluarga sejak balita harus dilakukan secara gencar oleh orang tua agar supaya setiap orang Indonesia memahami keberagaman, heterogenitas, dan kebhinekaan secara terbuka, berpikiran terbuka, dan modern dalam berpikir, bertindak dan berbuat, sebagaimana amanat dalam Pancasila.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa Pancasila cenderung diabaikan di tengah masyarakat yang modern, di era globalisasi, dan di era revolusi industri 4.0. perkembangan media sosial dan dunia maya yang sangat masif memungkinkan setiap manusia mendapatkan akses informasi secara cepat melalui gadget pribadi sehingga berdampak buruk pada pola pikir dan gaya hidup generasi muda, khususnya generasi milenial (Y) dan generasi Z yang serba konsumernis, hedonis, individualis,

dan liberalis. Selain itu, muncul perilaku anarkis, radikal, dan fanatisme tertentu akibat perkembangan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya, dan bahkan cenderung berita fake atau hoax. Pancasila sebagai ideologi negara cenderung ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, digantikan oleh ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Hasil survei *Cyrus Network* tahun 2019 tentang Persepsi Publik terhadap penerimaan masyarakat pada ideologi Pancasila menunjukkan bahwa ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah agama mayoritas. Pancasila dianggap kurang menarik bagi masyarakat sehingga mereka lebih melirik Khilafah, yang tentunya hal ini sangat membahayakan.

Survei dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2019 juga menunjukkan data yang mengkhawatirkan tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dimana data survei hasilnya adalah 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Penolakan terhadap ideologi Pancasila di kalangan pegawai negeri tersebut jadi penyebab lemahnya ketahanan nasional dan membahayakan keamanan nasional. Penyebab turunnya ketahanan nasional di negara Indonesia adalah penurunan di masalah ideologi bangsa, yakni Pancasila. Sekitar 19,4 persen PNS tidak setuju ideologi



Pancasila, yang tentunya merupakan data yang sangat mengagetkan semua pihak.

Survei Alvara Research Center Tahun 2017 juga menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an, yang setuju dengan konsep khilafah sebagai bentuk negara Indonesia. Survei ini dilakukan terhadap 4.200 milenial yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di seluruh Indonesia. Mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal sebuah negara. Survei terhadap kalangan profesional yang melibatkan 1.200 responden ini dapat dimaknai bahwa Pancasila saat ini memang dalam ancaman sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan pembumian Pancasila di tengah masyarakat.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Tahun 2017 juga melakukan penelitian dan mengungkapkan hasil riset bersama LIPI, UI, dan sejumlah peneliti sosial lainnya di Indonesia tentang radikalisme dan wawasan kebangsaan pada pelajar dan mahasiswa. Hasilnya, sekitar 23 persen pelajar dan mahasiswa siap menegakkan sistem khilafah. Artinya, ternyata kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa malah siap berjihad untuk menegakkan sistem khilafah, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Di kelompok mahasiswa menduduki 23,4 persen pada akhir tahun 2017 yang siap mengikuti khilafah. Sedangkan pada tingkat SMA

mencapai 23,3 persen. Sebuah angka yang fantastis dan mencengangkan karena kalangan SMA dan Mahasiswa adalah kalangan milenial yang tergolong sebagai generasi terdidik di dunia pendidikan.

### **Pancasila Sebagai Obat Mujarab**

Pancasila terdiri dari lima sila, yang intinya merupakan nilai-nilai universal, yakni: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Kelima nilai dalam Pancasila ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menggerakkan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus disosialisasikan dan diajarkan secara terus menerus kepada semua komponen bangsa secara interaktif, dialogis dan menarik, dan harus dihilangkan cara dan metode pembumian Pancasila yang doktiner, monologis dan satu arah.

Oleh karena itu, akan dilihat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat saat ini dan apa yang seharusnya dilakukan agar supaya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat menjadi nilai yang praksis, aplikatif, operasional, dan mampu dipahami serta diamalkan secara mudah oleh semua komponen bangsa. Hal ini penting karena Pancasila harus dikebumikan agar tidak terkesan menjadi bahasa dewa-dewa yang sulit membumi. Tugas dari masyarakat Indonesia yang harus membumikan Pancasila menjadi bahasa yang mudah dicerna, tindakan yang kongkret dan contoh yang riil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.



## **1. Nilai Ketuhanan**

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila kurang mendapatkan tempat dihati sebagian kecil masyarakat Indonesia. nilai-nilai ketuhanan sebagai sila pertama dari Pancasila kurang dihayati dan diamalkan. Hal ini tercermin dari masih adanya sekelompok pihak yang menginginkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar ditumbuhkan kembali. Sudah menjadi kesepakatan bangsa bahwa Indonesia bukan negara agama, namun negara yang mendasarkan pada negara Pancasila, dimana terdapat enam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya, masih ada yang menginginkan terbentuknya negara yang berbasis pada agama, alergi terhadap agama lain, dan cenderung sempit dalam memandang ajaran agama, sehingga timbul potensi konflik intra agama dan konflik antar agama.

Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan harus diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat. Semua agama mengajarkan perdamaian, kedamaian, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, dan saling tenggang rasa antar pemeluk agama, sehingga tidak boleh ada penganut agama yang satu mengkafirkan dan

mentoghutkan pemeluk agama lain hanya karena beda keyakinan/ beda aliran kepercayaan/ dan beda agama. Nilai ketuhanan dalam Pancasila justru mengharuskan kepada semua pemeluk agama untuk memeluk agama dan aliran kepercayaannya masing-masing, tanpa harus menyudutkan pemeluk agama lain.

Sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme, harus dihapus dan dihilangkan melalui program deradikalisasi, dimana nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila harus mampu diserap, dipahami, dan diamalkan oleh semua komponen bangsa. Bukankah merusak, menyiksa, membunuh, dan merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh semua ajaran agama apapun?. Para pelaku terorisme harus memahami bahwa nilai-nilai ketuhanan menganjurkan agar yang mayoritas melindungi yang minoritas, dan yang minoritas menghormati yang mayoritas.

## **2. Nilai Kemanusiaan**

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa Pancasila, khususnya sila kedua, yakni nilai-nilai kemanusiaan, belum terpatri semuanya dalam hati sanubari semua masyarakat Indonesia. Masih ada segelintir kelompok masyarakat yang kurang menghormati hak dan kewajiban warga negara. Dalam aturan perundang-undangan, semua warga negara wajib membela negara, namun dalam

prakteknya, masih ada sekelompok warga negara yang menolak bela negara dan mengusulkan untuk lebih melakukan bela agamanya masing-masing. Contoh perilaku yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan adalah menghalangi orang untuk beribadah, menolak pendirian tempat ibadah, merusak rumah ibadah, mengintimidasi pemeluk agama lain, dan membuat kebijakan publik yang merugikan pemeluk agama lain.

Nilai-nilai kemanusiaan, yang didalamnya terkandung penghormatan terhadap hak dan kewajiban, menghargai manusia lain, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi HAM, harus mampu diinternalisasi dan disosialisasikan kepada semua komponen bangsa. tidak boleh dalam kehidupan masyarakat menghina agama lain, menistakan ajaran agama lain, menjelek-jelekan penganut agama lain, dan memprovokasi orang untuk membunuh, menyiksa, maupun menyerang pemeluk agama lain, karena hal itu akan melanggar nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila.

Kebijakan deradikalisasi yang digerakan oleh BNPT untuk menangkal aksi terorisme harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dalam ideologi Pancasila. Harus ditampilkan dalam kehidupan masyarakat yang menghormati perbedaan, menghargai pluralitas, memegang teguh prinsip / slogan bhineka tunggal ika, dan memelihara

kemajemukan dalam bingkai NKRI. Melalui aplikasi dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat Indonesia harus mampu menunjukkan diri sebagai masyarakat yang beradab, bukan masyarakat yang biadab, sehingga proses keadaban bangsa Indonesia akan menampilkan warisan luhur bagi anak cucu penerus bangsa.

### **3. Nilai Persatuan**

Praktek nyata di lapangan membuktikan bahwa Pancasila, khususnya sila ketiga, yang mengandung nilai-nilai persatuan, masih belum dihayati dan diamalkan oleh semua masyarakat Indonesia. Nilai-nilai persatuan, yang menekankan pada nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, yang terbingkai dalam bela negara dan wawasan kebangsaan, sudah mengalami kelunturan. Sekelompok pihak masih mengungkit-ngungkit tentang bentuk negara yang lebih memilih membela agama saja dibandingkan membela negara, lebih memilih negara khilafah dibandingkan dengan negara Pancasila berbasis NKRI, dan lebih memilih nasionalisme keagamaan dibandingkan dengan nasionalisme terhadap NKRI. Wawasan kebangsaan juga belum tercermin dalam sikap dan perilaku, karena yang menonjol malah primordialisme, semangat kedaerahan, wawasan kedaerahan, dan xenophobia, yang cenderung menafikan eksistensi Pancasila.

Nilai-nilai persatuan yang merupakan nilai Pancasila mencerminkan bahwa Pancasila dapat memperkokoh NKRI, meneguhkan bhineka tunggal ika, dan menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan, bela negara, dan patriotisme. Nilai persatuan dalam Pancasila ini sebenarnya sejalan dengan ajaran agama Islam, yang menyebutkan bahwa : "hizbul wathan minal iman", yang artinya : "cinta tanah air bagian dari iman". Maksudnya, ketika rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam, mencintai tanah air Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sikap dan perasaan tersebut merupakan bagian dari keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada yang bertentangan antara nilai-nilai persatuan dalam Pancasila dengan ajaran agama, termasuk agama Islam.

Pendekatan bela negara dan pendekatan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai persatuan dalam kerangka Pancasila dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode untuk menerapkan kebijakan deradikalisasi untuk para teroris, mantan teroris, mantan napi teroris, keluarga teroris maupun masyarakat umum lainnya. Nilai-nilai persatuan harus terus dikumandangkan kepada semua komponen bangsa kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun, agar supaya semua masyarakat Indonesia dan seluruh komponen

bangsa selalu cinta, sayang dan suka terhadap bangsa Indonesia, sehingga akan tumbuh rasa bela negara, yang pada akhirnya akan mampu menangkal dan menangkis potensi aksi terorisme.

#### **4. Nilai Musyawarah Mufakat**

Dalam perspektif Pancasila, terdapat nilai-nilai demokrasi yang substansial, yakni berupa nilai musyawarah mufakat. Namun demikian, nilai-nilai musyawarah yang diamanatkan dalam ideologi Pancasila sudah banyak mengalami degradasi baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap perselisihan dan sengketa di tengah masyarakat sebagian besar diselesaikan melalui cara-cara yang kurang beradab, melanggar hukum, dan tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dari maraknya ujaran kebencian (hate speech), berita hoax, kampanye hitam, mengkafirkan orang lain, menyiksa, dan membunuh untuk balas dendam dan kepentingan pribadi jangka pendek yang emosional.

Musyawarah mufakat merupakan amanat dalam Pancasila sila keempat, yang seharusnya menjadi solusi dan jalan pemecahan terhadap setiap sengketa, konflik, maupun perselisihan ataupun beda pendapat di tengah masyarakat. Selama ini, perbedaan dipandang

sebagai kutukan sehingga yang satu meniadakan yang lain dengan cara-cara kekerasan. Aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia merupakan aksi yang salah dan kebablasan karena tidak mampu menghargai perbedaan dan tidak mampu mentransformasikan perbedaan agama menjadi perekat melalui jalan dialog dan diskusi. Cara-cara kekerasan dengan mengebom, munculnya bom panci, menjadikan polisi menjadi target operasi, maupun orang / fasilitas berbaur barat sebagai sasaran, hanya karena berbeda atribut di dunia, merupakan pengingkaran terhadap musyawarah mufakat.

Pemerintah dan aparat terkait sudah saatnya menumbuhkan sikap dialog dan diskusi antar pihak yang bertikai dalam menyelesaikan perbedaan, menangani beda keyakinan, maupun menanggulangi beda paham ideologi tertentu. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah contoh dimana sekelompok pihak tidak mau menyelesaikan perbedaan dengan cara damai, namun menempuh cara kekerasan, dan bahkan menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri, dengan atribut agama tertentu, namun dalam perkembangannya, malah menodai dan mencoreng agama tertentu. Aksi intoleransi, radikalisme, dan terorisme sebenarnya dapat dikatakan sebagai aksi penistaan agama karena melanggar ajaran agama

apapun, mengingat ajaran agama justru menganjurkan dialog dan diskusi dalam menyelesaikan permasalahan, persoalan, dan perbedaan, sehingga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat, musyawarah mufakat.

## **5. Nilai Keadilan**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi dari sila kelima Pancasila. Nilai keadilan merupakan nilai universal yang diakui oleh seluruh masyarakat dunia, sehingga Pancasila sebagai falsafah negara, khususnya sila kelima, harus mendapatkan tempat dihati masyarakat Indonesia untuk ditaati, dipatuhi, direalisasikan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dalam prakteknya, nilai keadilan masih jauh panggang dari api. Masih ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, antara buruh dan borjuis, antara yang kuat dan yang lemah. Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat yang diwarnai oleh pengangguran, kemiskinan, dan kemelatan dapat potensial mendorong perilaku intoleran, radikalisme, dan terorisme.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa aksi terorisme dilakukan sebagian besar oleh masyarakat bawah, berpendapatan rendah, status sosial yang rendah, dan pekerjaan yang rendah. Kondisi ketiadaan ekonomi sosial ini menjadi peluang bagi penyebaran

ajaran radikal dan aksi teror, melalui cuci otak / *brain wash*, dan cara-cara indoktrinasi lainnya. Pelaku teror yang ditangkap oleh Densus 88/AT Polri membuktikan bahwa pelakunya penjual bubur ayam, penjual baso, maupun pedagang kaki lima, maupun penjahit dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah sumber pemicu terjadinya aksi terorisme. Mereka menganggap bahwa dunia ini tidak adil, pemerintah tidak adil, dan aparat tidak adil, karena semua dianggap menindas dan memihak, sehingga mereka meyakini untuk menyerang siapa saja yang membuat tidak adil, sebagai bentuk frustrasi sosial yang dialaminya.

Pendekatan ekonomi, pendekatan kewirausahaan, dan pendekatan usaha lainnya merupakan alternatif untuk dijalankan untuk menerapkan kebijakan deradikalisasi, dengan tujuan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak, status sosial yang layak, mata pencaharian yang baik, dan penghidupan yang mapan, sehingga akan dirasakan oleh masyarakat terjadi proses keadilan sosial. Nilai-nilai keadilan sosial akan dapat berhasil dan menangkal aksi terorisme apabila masyarakat disejahterakan melalui pembukaan lapangan pekerjaan maupun melalui usaha sendiri dan bantuan modal dari pemerintah, sehingga mereka merasa diperhatikan, yang pada akhirnya mereka merasa diberikan keadilan,

dan terorisme diharapkan tidak akan terjadi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Arus globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan digitalisasi, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses berbagai ajaran, paham maupun ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Media sosial juga telah dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk menyebarkan paham intoleran, ajaran radikalisme, dan semangat terorisme. Dalam dunia yang tanpa batas ini, interaksi antar warga negara di dunia tidak bisa dibatasi oleh apapun, sehingga memberikan ruang gerak yang bebas bagi kelompok teroris untuk menyebarkan paham sesat, mengajarkan cara membuat bom, menularkan doktrin sesat dan menganjurkan aksi teror terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebagai toghut dan kafir.

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, merupakan ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan falsafah negara. Pancasila sengaja berupaya diganti dengan ideologi lain berbasis agama, NKRI ingin diganti menjadi negara khilafah, dan bhineka tunggal ika ingin dirubah menjadi uniformitas, sehingga semua pihak perlu sikap waspada terhadap sekelompok pihak

yang mengarah pada kelompok radikal yang berpotensi mengarah pada aksi teror. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus diselamatkan oleh semua komponen bangsa. Semua pihak harus bertanggungjawab terhadap eksistensi dan penyelamatan Pancasila, dan bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI/Polri semata.

Nilai-nilai Pancasila yang didalamnya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan, harus diajarkan, dipahami, diketahui, dihayati, dijiwai dan diamalkan oleh semua komponen bangsa, khususnya generasi muda penerus bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Program dan kegiatan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar diserap dan dijiwai oleh semua komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal, penangkis, penindak, dan pemulih terhadap degradasi keimanan dan moralitas sekelompok masyarakat yang berperilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Danim, Sudarwin. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Setia.
- Kansil. CST. (2006). *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Latif, Yuddy, (2011). *Negara Paripurna*. Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- MS. Kaelan. (1996). *Pendidikan Pancasila : Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- MS. Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. (2006). *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, Agus. (2014), *Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa Kedokteran*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Subagyo, Agus. (2015). *Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarbaini, Syahrial. (2003). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia.
- <https://metro.tempo.co/read/1153860/jakarta-paling-intoleran-ketiga-ini-hasil-survei-selengkapnya/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.
- <https://www.merdeka.com/politik/lipi-temukan-fakta-intoleransi-meningkat-di-indonesia.html>.



Diakses pada tanggal 20 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

<https://politik.rmol.id/read/2019/08/09/398765/survei-masih-ada-masyarakat-yang-menolak-ideologi-pancasila>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.

<https://tirto.id/kemendagri-sebut-194-persen-pns-tak-setuju-ideologi-pancasila-daef>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180307191320-20-281228/survei-alvara-sebagian-milenial-setuju-khilafah>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/3332028/menristekdikti-hasil-survei-23-persen-pelajar-siap-tegakkan-khilafah>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.

